

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang diiringi dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan, paradigma dalam studi hubungan internasional telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar. Aktivitas kerja sama internasional kini tidak lagi menjadi monopoli pemerintah pusat semata, tetapi telah berkembang merambah hingga ke tataran pemerintah daerah. Gejala ini lazim disebut sebagai paradiplomacy atau diplomasi sub-nasional, yakni suatu bentuk keterlibatan langsung aktor-aktor pemerintahan di bawah level nasional dalam arena hubungan internasional guna memperjuangkan kepentingan daerahnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik (Duchacek dan Soldatos 1990, 34-38). Berkembangnya praktik paradiplomacy dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan daerah untuk mengakses sumber daya eksternal, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta membangun jaringan internasional yang dapat mendukung pembangunan daerah.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan ruang bagi daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri (Kementerian Dalam Negeri 2008, 2011). Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman

Kerangka regulasi mengenai hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan mitra luar negeri selanjutnya diperbarui melalui Permendagri Nomor 23 Tahun 2011 (Kementerian Dalam Negeri, 2008, 2011). Regulasi tersebut menjadi pijakan hukum yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan internasional guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat laju pembangunan di tingkat daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kedudukan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menunjukkan peran aktif dalam

Menjalin berbagai kerja sama internasional. Status keistimewaan ini memberikan kewenangan khusus dalam berbagai bidang, termasuk tata cara pengisian jabatan, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Keunikan status ini, ditambah dengan kekayaan warisan budaya, sektor pendidikan yang kuat, dan potensi pariwisata yang tinggi, menjadikan DIY sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki daya tarik tinggi bagi kerja sama internasional.

Hingga tahun 2024, DIY telah menjalin berbagai bentuk kerja sama luar negeri, termasuk kerja sama *sister city*, *sister province*, *technical cooperation*, dan berbagai program bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. (Pemerintah Kota Yogyakarta 2024) Kerjasama-kerjasama ini mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, pariwisata, budaya, pertanian, UMKM, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu kerja sama strategis yang terjalin adalah kerjasama dengan Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea

Selatan, yang diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) pada tanggal 23 Oktober 2014 (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, n.d.; Indraswari 2015).

Pemilihan Gyeongsangbuk-do sebagai mitra kerja sama bukanlah tanpa alasan. Provinsi Gyeongsangbuk-do terletak di bagian tenggara Korea Selatan dengan luas wilayah sekitar 19.030 km² dan populasi sekitar 2,6 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Korea 2023). Provinsi ini memiliki karakteristik yang mirip dengan DIY dalam beberapa aspek, yaitu sama-sama merupakan wilayah yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, memiliki sektor pertanian yang kuat, menghadapi tantangan urbanisasi dan migrasi penduduk muda ke kota-kota besar, serta memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan (Indraswari 2015; Gyeongsangbuk-do Provincial Government n.d.). Gyeongsangbuk-do adalah rumah bagi kota-kota bersejarah seperti Gyeongju yang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Silla, serta memiliki banyak situs warisan dunia UNESCO, yang menunjukkan kesamaan dengan Yogyakarta sebagai kota budaya dan bekas ibu kota kerajaan (Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021)

Hal penting lainnya adalah Korea Selatan, khususnya Provinsi Gyeongsangbuk-do, memiliki pengalaman sukses yang luar biasa dalam transformasi Saemaul Undong, yang secara harfiah berarti Gerakan Desa Baru, merupakan program yang diluncurkan pada awal dekade 1970-an di bawah pemerintahan Presiden Park Chung-hee (Digilib UNS 2017, 31). Gerakan ini

dirancang sebagai upaya pembangunan pedesaan yang berbasis partisipasi masyarakat, dengan sasaran utama memodernisasi kawasan pedesaan Korea sekaligus meningkatkan kesejahteraan kalangan petani. Tiga prinsip filosofis menjadi landasan Saemaul Undong, yakni diligence (kerja keras), self-help (kemandirian), dan cooperation (gotong royong) (Park 2009, 113-140). Lewat implementasi program tersebut, Korea Selatan mampu mengubah desa-desa yang sebelumnya terbelakang secara ekonomi menjadi komunitas yang berdaya dan makmur dalam rentang waktu yang terbilang singkat

Keberhasilan Semaul Undong tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tetapi juga pada transformasi mental dan budaya masyarakat desa. Program ini berhasil menumbuhkan semangat kemandirian, etos kerja, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan *bottom-up* yang digunakan, di mana masyarakat desa sendiri yang merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan dukungan pemerintah, terbukti efektif dalam menciptakan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program. (Chambers 1997, 39). Pada tahun 1970-an, lebih dari 30.000 desa di Korea Selatan berpartisipasi dalam gerakan ini, dan pada akhir dekade tersebut, mayoritas desa telah mengalami peningkatan signifikan dalam infrastruktur, pendapatan, dan kualitas hidup (Park 1979, 127)

Pengalaman sukses Korea Selatan dalam pembangunan pedesaan ini menjadi daya tarik bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah Korea Selatan sendiri telah menjadikan Saemaul Undong sebagai salah satu model bantuan pembangunan internasional melalui *Korea International*

Cooperation Agency (KOICA) dan berbagai lembaga lainnya (Kim 2012, 29). Model ini telah diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi tergantung konteks lokal masing-masing negara.

Di Indonesia, konsep pembangunan desa sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Orde Baru, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program pembangunan desa seperti INPRES Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Lewis 2011, 78). Namun, program-program tersebut seringkali menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan transformasi mental. Pada era reformasi, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana paradigma pembangunan desa mengalami perubahan mendasar (Antlöv dan Wetterberg 2018, 5). Desa tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk mengelola pembangunannya sendiri melalui mekanisme Dana Desa.

DIY sebagai provinsi dengan mayoritas wilayah bercirikan pedesaan dan agraris menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan desa. Tantangan pertama adalah masalah struktural yang kompleks, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya tata kelola pemerintahan desa. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, hingga tahun 2023 masih terdapat sekitar 12.548 desa tertinggal dari total 74.961 desa di Indonesia, yang sebagian besar mengalami

kendala dalam pengelolaan dana desa dan perencanaan pembangunan yang partisipatif (Kementerian Desa PDTT 2023). Lemahnya kapasitas aparat desa dalam menyusun perencanaan strategis, mengelola keuangan desa, serta mengimplementasikan program-program pembangunan menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Kondisi ini diperparah dengan tingkat pendidikan perangkat desa yang relatif rendah, di mana data BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 18,7% kepala desa yang berpendidikan sarjana, sementara mayoritas masih berpendidikan SMA/ sederajat (BPS 2022).

Tantangan kedua berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar yang masih menjadi persoalan mendasar di wilayah perdesaan. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat 32,4% desa yang belum memiliki akses internet, 21,8% desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN secara optimal, dan sekitar 15,6% desa yang belum memiliki akses jalan beraspal sepanjang tahun (BPS 2023). Kesenjangan infrastruktur ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas ekonomi desa, terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta sulitnya integrasi desa dengan pasar regional dan nasional. Keterbatasan infrastruktur juga menghambat upaya digitalisasi layanan pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi, sehingga desa semakin tertinggal dalam era transformasi digital.

Tantangan ketiga berkenaan dengan rendahnya sinergi dan kolaborasi lintas-pemangku kepentingan dalam proses pembangunan desa, mencakup hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya, kalangan dunia usaha, institusi pendidikan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil. Kajian yang

diselenggarakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada (2022) memperlihatkan bahwa 67% program pembangunan desa masih bercorak sektoral dan belum terintegrasi secara memadai, sedangkan hanya 23% desa yang telah menjalin kemitraan aktif dengan pihak eksternal dalam upaya pengembangan ekonomi lokal (UGM Press 2022). Fragmentasi program serta minimnya kerja sama multi-pihak menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya, duplikasi kegiatan, serta rendahnya keberlanjutan program pembangunan. Kondisi ini meonunjukkan urgensi untuk membangun model kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan, guna mengoptimalkan potensi desa dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DIY, sekitar 60% wilayah DIY masih berupa kawasan perdesaan dengan mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian dan UMKM (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta 2025). Namun, sektor pertanian menghadapi berbagai masalah seperti kepemilikan lahan yang sempit, produktivitas yang rendah, akses terhadap teknologi dan pasar yang terbatas, serta regenerasi petani yang mengkhawatirkan akibat urbanisasi kaum muda (Badan Pusat Statistik 2024, 42). Di sisi lain, desa-desa di DIY memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta industri kerajinan yang telah menjadi ciri khas masyarakat Yogyakarta.

Dalam konteks inilah, kerja sama *sister province* antara DIY dan Gyeongsangbuk-do dapat menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Kerja sama ini dirancang untuk mencakup berbagai bidang strategis dengan fokus utama pada pemberdayaan masyarakat desa. MoU yang ditandatangani pada tahun 2014 mengidentifikasi beberapa area kerja sama prioritas, termasuk: (1) pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan desa; (2) peningkatan kapasitas aparatur desa dan tokoh masyarakat; (3) pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif; (4) peningkatan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi; (5) pengembangan UMKM dan koperasi desa; (6) pertukaran budaya dan pemuda; serta (7) kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan (Kementerian Desa PDTT 2014, 3-5). Meskipun kerangka kerja sama ini telah ditetapkan, kajian mendalam tentang implementasi dan dampaknya di lapangan masih terbatas.

Penelitian tentang kerja sama *sister province* dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa masih relatif terbatas dalam literatur akademik Indonesia. Kebanyakan kajian tentang *paradiplomacy* lebih berfokus pada aspek politik dan ekonomi makro, seperti analisis kebijakan, motivasi politik, atau dampak terhadap perdagangan dan investasi antar daerah, sedangkan dimensi sosial dan dampak mikro di tingkat masyarakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, masih kurang mendapat perhatian dari peneliti. Padahal, keberhasilan kerja sama internasional pada akhirnya harus dikaji dari manfaat konkret yang dirasakan oleh masyarakat sebagai subjek dan tujuan akhir pembangunan.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji implementasi Saemaul Undong di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi model Saemaul Undong sangat

bergantung pada konteks lokal, termasuk struktur sosial masyarakat, sistem pemerintahan desa, kondisi ekonomi, dan budaya lokal. Studi-studi tersebut juga mengidentifikasi beberapa tantangan umum dalam implementasi Saemaul Undong di luar Korea, seperti perbedaan konteks historis dan politik, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemahaman mendalam tentang filosofi dan nilai-nilai yang mendasari gerakan Saemaul.

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian telah mengkaji program-program yang terinspirasi dari Saemaul Undong, seperti di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Namun, penelitian khusus tentang implementasi kerjasama sister province DIY-Gyeongsangbuk-do dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan perspektif jangka panjang (10 tahun) masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan melakukan kajian komprehensif untuk memahami proses, dinamika, tantangan, dari implementasi kerja sama selama satu dekade.

Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan dinamika hubungan Indonesia-Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu mitra pembangunan dan ekonomi penting bagi Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara telah ditingkatkan menjadi *Special Strategic Partnership* pada tahun 2017, yang mencakup kerja sama di berbagai bidang strategis (Kemlu RI 2017, 12-15). Dalam konteks kerja sama pembangunan, Korea Selatan melalui KOICA telah menjadi salah satu donor utama bagi Indonesia, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan pedesaan. (KOICA 2021, 7). Pengalaman Korea Selatan dalam transformasi dari negara

miskin pasca perang menjadi salah satu ekonomi terkuat di dunia dalam waktu relatif singkat menjadi inspirasi dan referensi penting bagi pembangunan Indonesia.

Kerjasama antara Daerah Istimewa Yogyakarta-Gyeongsangbuk-do dapat dipandang sebagai mikrokosmos dari hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan, yang menunjukkan bagaimana kerja sama antar daerah dapat menjadi komplemen efektif dari kerjasama *government-to-government* di level nasional. Keberhasilan kerjasama ini dapat menjadi model yang direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan *paradiplomacy* yang substantif dan memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Sebaliknya, tantangan dan pembelajaran dari kerja sama ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi perbaikan kerangka kebijakan dan implementasi kerja sama luar negeri di tingkat daerah.

Berdasarkan titik tolak masalah dan pentingnya kerjasama *sister province* antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do Korea Selatan, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif implementasi kerjasama *sister province* antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gyeongsangbuk-do Korea Selatan dalam pemberdayaan masyarakat desa periode 2014-2024. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam dinamika pelaksanaan kerja sama, program-program yang telah diimplementasikan, serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat desa di DIY baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kapasitas masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Kerja sama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do Korea Selatan telah berlangsung sejak 2003 dengan fokus pada

pemberdayaan masyarakat desa di Bleberan. Meskipun MoU telah menetapkan tujuh area kerja sama prioritas, implementasi dan dampaknya di lapangan belum terdokumentasi secara komprehensif. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai efektivitas transfer praktik Saemaul Undong ke konteks pembangunan desa di Yogyakarta. Kajian tentang kerja sama *sister province* dalam pemberdayaan masyarakat tingkat *grassroots* masih sangat terbatas dalam literatur akademik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis implementasi kerja sama ini selama periode 2022-2024. Berdasarkan uraian rumusan masalah ini, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yakni bagaimana *paradiplomacy* Indonesia dengan Korea Selatan melalui *sister province* (DIY) Gyeongsang-bukdo, studi kasus Pemberdayaan Masyarakat Desa Periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui secara komprehensif Paradiplomasi Indonesia: Korea Selatan *sister province* (DIY) Gyeongsang-bukdo dalam pemberdayaan masyarakat desa Bleberan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Paradiplomasi Indonesia: Korea Selatan *sister province* (DIY) Gyeongsang-bukdo dalam pemberdayaan masyarakat desa Bleberan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hubungan internasional yakni dalam studi Paradiplomasi atau diplomasi daerah, khususnya dalam konteks negara berkembang.. Penelitian ini memperkaya literatur akademik tentang bagaimana pemerintah sub-nasional dapat menjadi aktor aktif dalam hubungan internasional dan bagaimana kerja sama internasional daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar *ceremonial diplomacy*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah DI Yogyakarta dan pemerintah pusat Indonesia untuk lebih kolaboratif dalam memberdayakan masyarakat desa melalui implementasi kerjasama *Sister Province* sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan program pemberdayaan masyarakat desa di masa mendatang. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan data informasi bagi mahasiswa yang tertarik mengkaji isu-isu Paradiplomasi, pembangunan desa, dan kerja sama internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman praktis tentang implementasi kerja sama *sister province* dan menjadi bahan pembelajaran mengenai metodologi penelitian dalam menganalisis program pemberdayaan masyarakat desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab dengan sistematika yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian mengenai urgensi kerja sama *sister province* antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do Korea Selatan dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa bleberan. Bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun akademis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi kerangka analisis penelitian. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran yang menghubungkan konsep-konsep teoritis dengan fokus penelitian, hipotesis dan metode penelitian terkait *paradiplomacy* indonesia dengan korea selatan *sister province* (DIY) Gyeongsang-bukdo dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bleberan

BAB III Analisis Paradiplomasi: Sister Province DIY – Gyeongsang-bukdo

Bab ini menyajikan deskripsi umum tentang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do Korea Selatan, meliputi kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dan karakteristik pembangunan desa di kedua wilayah. Bab ini juga menguraikan sejarah dan perkembangan kerja sama *sister province* antara DIY dan

Gyeongsangbuk-do sejak penandatanganan MoU tahun 2014 hingga 2024.

BAB IV Dampak Paradiplomacy Indonesia Dan Korea Selatan MELALUI Kerja Sama Sister Province DIY–GYEONGSANGBUK-DO Studi Kasus Per berdayaan Masyarakat Desa 2022-2024

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis mendalam tentang implementasi kerja sama *sister province* dalam pemberdayaan masyarakat desa periode 2022-2024. Pembahasan meliputi: (1) program-program kerja sama yang telah dilaksanakan di tujuh area prioritas; (2) mekanisme dan proses implementasi kerja sama di tingkat pemerintah daerah dan desa; (3) transfer pengetahuan dan adaptasi model Saemaul Undong ke konteks lokal Yogyakarta; (4) capaian dan dampak kerja sama terhadap pemberdayaan masyarakat desa; (5) tantangan dan hambatan dalam implementasi; serta (6) faktor-faktor pendukung keberhasilan program.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan atas hasil penelitian yang merespons pertanyaan penelitian terkait implementasi kerja sama *sister province* dalam pemberdayaan masyarakat desa. Di samping itu, bab ini turut menghadirkan saran serta rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah daerah DIY, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat kerjasama *sister province* serta program pemberdayaan masyarakat desa ke depannya.